

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI DAN PELAYANAN KANTOR KELURAHAN SUKABUNGAH KOTA BANDUNG

Fitri Khoirunnisa¹, Siti Roifah², Soni Setiawan³, Rangga Sanjaya⁴

¹Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Jl. Sekolah Internasional No. 1-2 Antapani. Bandung (022-7100124)
e-mail: fitrikhoirunnisa66@gmail.com

²Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Jl. Sekolah Internasional No. 1-2 Antapani. Bandung (022-7100124)
e-mail: vavazia44@gmail.com

³Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Jl. Sekolah Internasional No. 1-2 Antapani. Bandung (022-7100124)
e-mail: soni.setiawan.it07@gmail.com

⁴Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya
Jl. Sekolah Internasional No. 1-2 Antapani. Bandung (022-7100124)
e-mail: ragga.rsj@gmail.com

Abstract

In accordance with Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE) is one of the government's efforts in developing electronic-based government systems. One of them is through e-government. Sukabungah Urban Village, Bandung is one of the villages in the city of Bandung that has implemented SPBE principles, but not yet optimally. Where the village administration and service system is still carried out manually, this results in a buildup of service requests which results in a queue of community requests exceeding the capacity of the room. This study aims to simplify the service system and administration of urban village offices to become computerized systems based on Web. The method used in the development of this information system is to use the waterfall method. The results of this study are the creation of an administrative information system and web-based village office services that can be accessed directly by the public.

Keywords: *Electronic-Based Government System, E-Government, Village, Waterfall Method*

Abstrak

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Salah satunya yaitu melalui e-government. Kelurahan sukabungah kota Bandung merupakan salah satu kelurahan yang berada di kota Bandung yang telah menerapkan prinsip-prinsip SPBE tetapi belum secara maksimal. Dimana sistem pelayanan dan administrasi kelurahan masih dilakukan secara manual, hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan permintaan layanan hingga mengakibatkan antrean permintaan masyarakat melebihi kapasitas ruangan. Penelitian ini bertujuan untuk mempermudah sistem pelayanan dan administrasi kantor kelurahan menjadi sistem yang terkomputerisasi berbasis Web. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi ini yaitu menggunakan metode waterfall. Hasil dari penelitian ini yaitu pembuatan sistem informasi administrasi dan layanan kantor kelurahan berbasis web yang dapat di akses langsung oleh pihak masyarakat.

Kata Kunci: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, E-Government, Kelurahan, Metode Waterfall

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh diberbagai bidang pemerintahan. Salah satu contoh teknologi informasi dalam bidang pemerintahan yaitu *e-government* (Juliana, Renaldi, & Santikarama, 2019). Dengan penggunaan sistem *e-government* ini, masyarakat dapat ikut serta dalam mengontrol pekerjaan pemerintah. Bentuk-bentuk dari penggunaan suatu *e-government* adalah *e-procurement*, *e-budgeting*, *e-catalog*, *e-audit*, *e-payment*, *e-health* bahkan hingga *e-controlling* (Syafriyani, 2019). Dalam penyelenggaraan *e-government* bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Wibiksana, Lestary, & Azmi, 2019). Menurut *United Nations Department Of Economic and Social Affairs pada tahun 2018* Indonesia mengalami peningkatan dalam penerapan *e-government* berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, dengan hasil peringkat 116 pada tahun 2016 yang kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi peringkat 107 (Hediyanto, 2019). Pemerintah Indonesia mulai menerapkan dan mengembangkan *e-government* dengan mengeluarkan beberapa kebijakan, yaitu Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Amalia & Adietya, 2019). Dengan dasar tersebut *e-government* dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan memberikan kebutuhan masyarakat secara transparan dan juga memberikan manfaat dalam pengalokasian waktu serta biaya (Juliana et al., 2019).

Saat ini *e-government* dikenal dengan istilah sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan untuk memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Yuhefizar, Sanjani, & Chadri, 2019). SPBE dilaksanakan dengan memenuhi beberapa

prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan sesuai dengan yang tertuang di pasal 2 ayat 1 (Taqiya, Mukaromah, & Pratama, 2020). Kelurahan merupakan entitas terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia. kelurahan mempunyai keistimewaan mengelola pemerintahan dalam hal pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung serta untuk menunjang kesejahteraan warganya secara mandiri dan sejahtera (Yudhanto, Ardhi, & Purbayu, 2017).

Salah satu kelurahan yang ada di Kota Bandung yaitu kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi. Kelurahan Sukabungah telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) tetapi belum secara maksimal, seperti dalam pengajuan permohonan surat kependudukan oleh masyarakat masih dilakukan secara manual, dimana masyarakat diharuskan datang secara langsung ke lokasi kelurahan. Hal ini mengakibatkan terjadinya penumpukan permintaan masyarakat dalam pembuatan permohonan surat yang mengakibatkan antrean permintaan masyarakat melebihi kapasitas ruangan, maka terjadilah ketidakpastian oleh masyarakat dalam pengajuan surat permohonan maupun pengambilan surat permohonan yang telah dibuat. Tidak hanya dalam hal penumpukan permintaan surat permohonan, tetapi dalam hal informasi mengenai syarat-syarat dalam pembuatan permohonan surat, dimana masyarakat sering kali tidak mengetahui mengenai syarat-syarat yang diberlakukan oleh kelurahan Sukabungah.

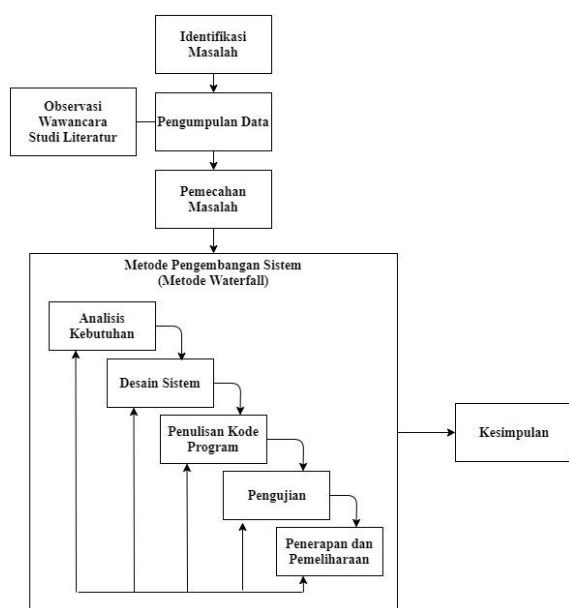
Dalam penerapan SPBE masih ditemukannya beberapa kendala yang dipengaruhi oleh instansi pusat (*top-down*), maka dari itu penelitian dengan pendekatan *bottom-up* yang dimulai melalui desa atau kelurahan terlebih dahulu maka dalam penerapan SPBE menjadi alternatif baru agar tata kelola pemerintahan berjalan efektif, efisien dan transparan (Yuhefizar et al., 2019). Sistem informasi pada pelayanan publik dapat mempercepat kinerja diantara unit kerja pada Mapolresta Kota Bandung (Mubarok et al., 2018). Sistem informasi

administrasi pelayanan kependudukan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Juliana et al., 2019).

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penulis melakukan penelitian serta membangun sebuah sistem informasi berbasis *web* dengan judul penelitian “**Sistem Informasi Administrasi dan Pelayanan Kantor Kelurahan Sukabungah Kota Bandung**”, sistem informasi yang di buat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengajukan permohonan surat kependudukan kapan saja dan dimana saja tanpa harus memakan waktu dan tenaga yang cukup lama serta mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait persyaratan pengajuan permohonan surat kependudukan.

2. Metode Penelitian

Berikut merupakan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

2.1 Identifikasi Masalah

Pada tahap ini peneliti mengamati mengenai permasalahan yang ada disekitar, terkhusus pada bidang pemerintahan. Terjadinya sistem pelayanan pada kantor kelurahan sukabungah Kota Bandung yang masih dilakukan secara manual sehingga membuat masyarakat harus melakukan permohonan pengajuan lebih lama.

2.2 Pengumpulan data

Sebelum melakukan tahap pengembangan sistem informasi, peneliti melakukan proses pengumpulan data yang terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1. Observasi

Pada tahap ini peneliti melakukan proses observasi langsung terhadap objek penelitian yang akan di ambil serta melihat kondisi dari sistem informasi yang sedang berjalan. Objek yang akan diteliti yaitu kelurahan Sukabungah Kecamatan Sukajadi Kota Bandung yang beralamatkan di jl. H. Yasin No. 53.

2. Wawancara

Pada tahap ini dilakukan tahap tanya jawab antara pihak kelurahan dan peneliti agar mendapatkan jawaban secara langsung. Tahap *interview* ini di wakili oleh SekLur dan Lurah Sukabungah dengan peneliti, sehingga informasi yang dihasilkan lebih akurat.

3. Studi literatur

Pada tahap ini peneliti mencari teori-teori terkait yang relevan terhadap permasalahan yang ditemukan. Referensi ini dapat di cari dari buku, jurnal, artikel maupun laporan penelitian yang lain .

2.3 Pemecahan Masalah

Pada tahap pemecahan masalah ini peneliti membuat solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Maka dibuatlah suatu sistem informasi administrasi dan pelayanan kantor kelurahan berbasis *web*, dengan menggunakan metode *waterfall*.

2.3.1 Metode Pengembangan Sistem

A. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan ini dilakukan dengan maksud untuk merancang alur sistem dan data apa saja yang akan digunakan dalam sistem. Serta menentukan kebutuhan apa saja yang dibutuhkan pada saat perancangan sistem informasi administrasi dan pelayanan kantor kelurahan Sukabungah.

B. Desain Sistem

Penggunaan desain sistem digunakan dalam melihat alur sistem yang akan berjalan serta hubungan *user* dengan sistem. Ada beberapa pemodelan sistem yang digunakan yaitu :

a) Use Case Diagram

Use case Diagram digunakan dalam merancang sistem yang akan di buat, dengan menggunakan use case maka akan terlihat kegiatan yang dilakukan *user* serta siapa saja yang berhak menggunakan sistem tersebut..

b) *Activity Diagram*

Activity Diagram digunakan untuk menunjukkan seluruh aktivitas sistem atau kegiatan dari sistem, dimulai dari prosesnya, keputusan yang terjadi pada sistem hingga berakhirnya kegiatan.

c) *Sequence Diagram*

Sequence diagram ini digunakan menggambarkan hubungan seluruh aktivitas yang terjadi antara use, sistem hingga prosesnya.

C. Penulisan Kode

Pada tahap selanjutnya yaitu pembuatan program dari sistem informasi administrasi dan pelayanan kantor kelurahan berbasis *web*.

D. Pengujian

Tahap pengujian ini dilakukan dengan cara pengujian keseluruhan sistem pelayanan kantor kelurahan yang telah dibuat. Pengujian ini dilakukan dengan pengujian *blackbox*.

E. Penerapan dan Pemeliharaan

Tahap penerapan adalah dimana program telah melewati tahap pengujian, dengan hal ini program siap untuk digunakan oleh *user* pengguna dan *user* administrasi pada kantor kelurahan Sukabungah Kota Bandung

2.4 Kesimpulan

Tahap kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian ini yaitu mengurutkan hasil dari pengembangan sistem informasi pada kantor kelurahan Sukabungah.

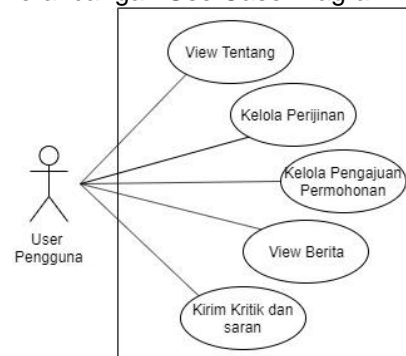
3. Hasil dan Pembahasan

Sebuah perancangan sistem merupakan suatu bagian dari metodologi pengembangan dari sebuah perangkat lunak (*Software*) dimana dilakukan untuk memberikan gambaran secara terperinci.

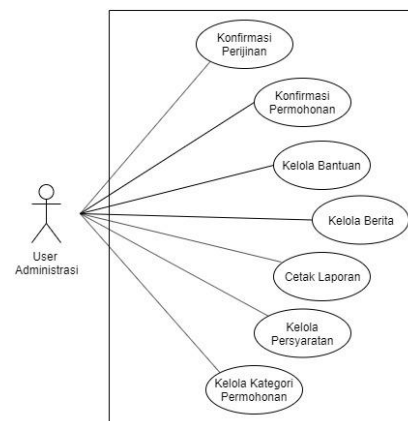
3.1 Perancangan Sistem

Dibawah ini merupakan perancangan sistem dengan menggunakan use case diagram, activity diagram dan sequence diagram, perancangan yang dibuat adalah sebagai berikut :

1. Perancangan Use Case Diagram

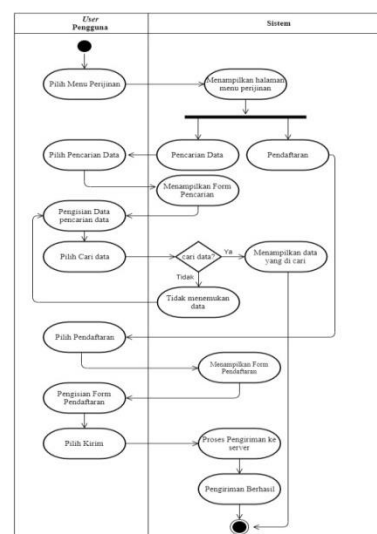


Gambar 3.1 Use Case User Pengguna

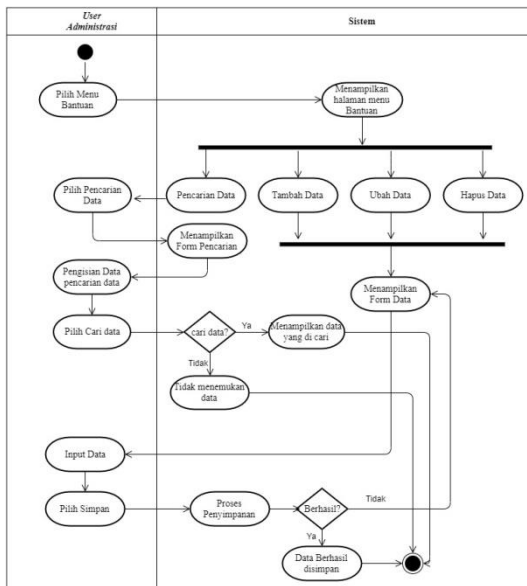


Gambar 3.2 Use Case User Administrasi

2. Perancangan Activity Diagram

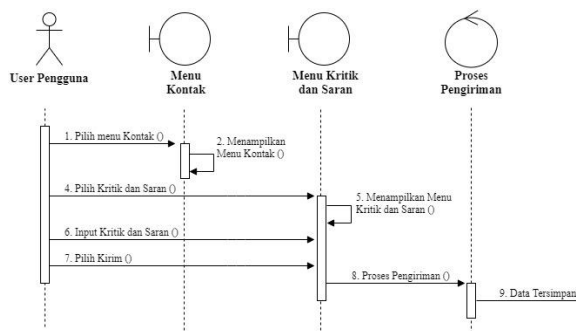


Gambar 3.3 Activity Diagram Kelola Perijinan

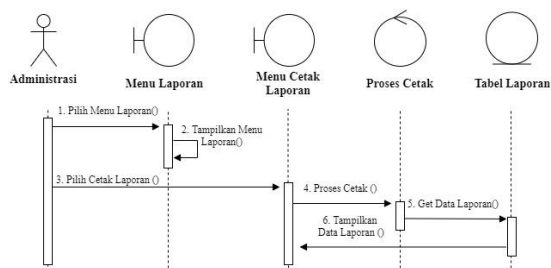


Gambar 3.4 Activity Diagram Kelola Bantuan

3. Sequence Diagram



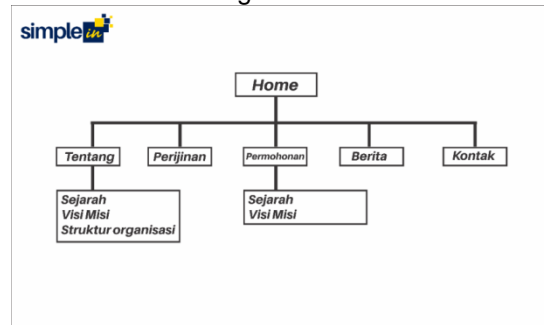
Gambar 3.5 Sequence Diagram Kirim Kritik dan Saran



Gambar 3.6 Sequence Diagram Cetak Laporan

3.2 Perancangan Struktur Menu

Berikut adalah perancangan struktur pada menu aplikasi *SIMPLE-IN* yang telah dibuat adalah sebagai berikut :

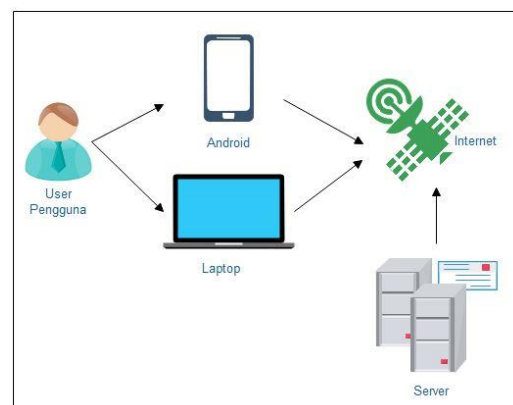


Gambar 3.8 Perancangan Struktur Menu yang diusulkan

3.3 Perancangan Arsitektur Jaringan

Dalam perancangan arsitektur jaringan yang diusulkan, adapun beberapa kebutuhan untuk mendukung arsitektur jaringan yang akan berlangsung, yaitu :

- a) User Pengguna : User yang menggunakan aplikasi.
- b) Smartphone, laptop ataupun alat elektronik lainnya yang dapat terhubung dengan internet.
- c) Internet : Digunakan dalam mengakses data dalam aplikasi.
- d) Server : Digunakan dalam penyimpanan database serta pengaksesan data



Gambar 3.9 Rancangan Arsitektur Jaringan yang Diusulkan

3.4 Implementasi

Implementasi ini dimaksudkan untuk membantu admin daerah untuk mengelola administrasi mengenai pelayanan dan perijinan yang ada di daerah setempat. Sedangkan untuk masyarakat, implementasi ini berisi penjelasan teknis untuk

menggunakan aplikasi serta *feedback* secara online mengenai kebermanfaatan aplikasi SIMPLE-IN.

3.4.1 Batasan Implementasi

Batasan implementasi dalam pengembangan sistem ini adalah :

1. Dikembangkan menggunakan PHP *Codeigniter*
2. Database menggunakan MS SQL
3. Pengguna sistem adalah admin *Kelurahan dan Masyarakat*

serta beberapa perangkat keras dan perangkat lunak, hal ini bertujuan agar mendukung disaat penulisan *coding website*.

3.4.2 Implementasi Perangkat Lunak

Perangkat lunak (*Software*) yang digunakan dalam pembuatan sistem ini adalah :

1. Sistem Operasi *Windows 8 Profesional*.
2. Bahasa pemrograman *Sublime Text 3 Codeigniter*.
3. XAMPP untuk local *internet* dan penyimpanan database.
4. Excel untuk pengetikan *backend*.
5. *Chrome dan Mozilla Firefox* sebagai *browser*.

3.4.3 Implementasi Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam proses komputerisasi, diantaranya adalah :

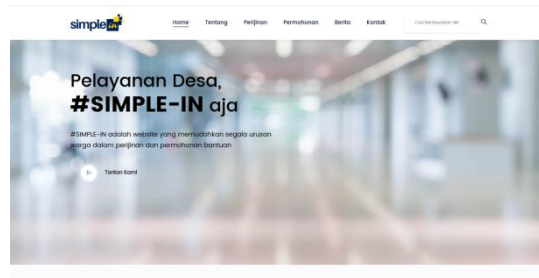
1. Processor : Pentium core i5 kecepatan minimum 2.3 GHz
2. Memory (RAM) : 4 GB DDR3 L
3. Harddisk : 500 GB
4. Wifi (Koneksi Internet)

3.4.4 Implementasi Antar Muka User Pengguna

Implementasi antarmuka merupakan tahap dari proses perancangan sistem aplikasi ini, dimana pada tahap ini sistem siap untuk dioperasikan oleh user pengguna.

1. Tampilan Halaman Utama (*Home*)

Tampilan halaman utama ini berisi tentang informasi-informasi dari semua sub menu yang ditampilkan kedalam dashboard utama.



Gambar 3.10 Antar Muka Menu Utama

2. Identitas Profile Kelurahan (Menu Tentang)

Pada menu Tentang ini terdapat 3 sub-menu sebagai informasi mengenai kelurahan setempat. Yaitu sejarah, visi misi serta struktur organisasi



Gambar 3.11 Antar Muka Menu Tentang

3. Menu Perijinan

Button perijinan ini merupakan halaman yang berisi informasi mengenai bagaimana cara dan syarat-syarat untuk mengajukan perijinan kepada pemerintah daerah.

a. Tampilan Tahapan Perijinan

Pada bagian bawah halaman menu perijinan, pengguna dapat langsung menekan "Form Perijinan" pada bagian bawah, dimana jika pengguna ingin mengajukan surat perijinan pada kantor kelurahan.



Gambar 3.12 Antar Muka Menu tahapan Perijinan

4. Menu Permohonan

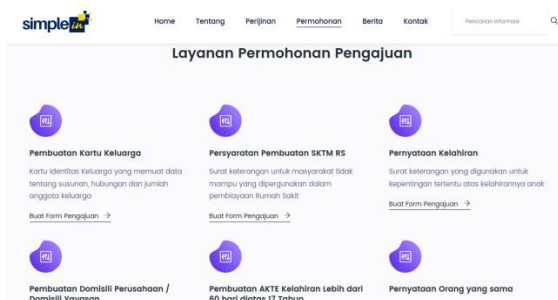
Di dalam menu permohonan terdapat dua Sub-menu yaitu menu pengajuan dan menu bantuan sosial. Menu pengajuan ini

merupakan menu layanan pengajuan surat permohonan yang ada di kelurahan kota seperti halnya untuk mengajukan surat pembuatan KK, AKTE kelahiran, pembuatan domisili perusahaan / yayasan, surat pernyataan orang yang sama, KTP, SKCK, dan lain-lain.



Gambar 3. 13 Antar Muka Menu Permohonan

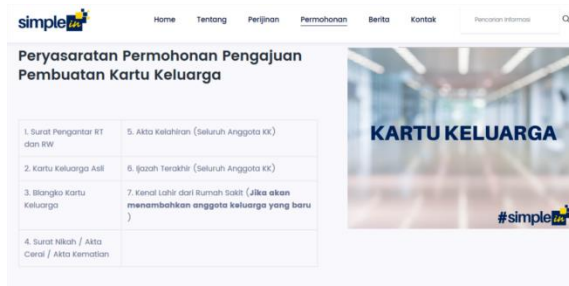
a. Tampilan layanan Permohonan Pengajuan



Gambar 3. 14 Antar Muka Menu Layanan Pengajuan

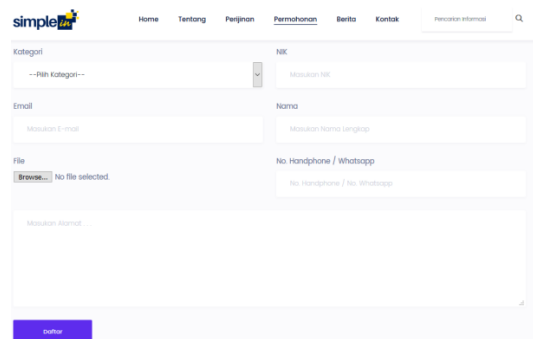
5. Tampilan Persyaratan Permohonan Pengajuan

Misal kita memilih surat pembuatan Kartu Keluarga, maka kita klik “Buat Form Pengajuan” dan akan muncul persyaratan apa aja yang harus dipenuhi untuk mengajukan surat pembuatan Kartu Keluarga.



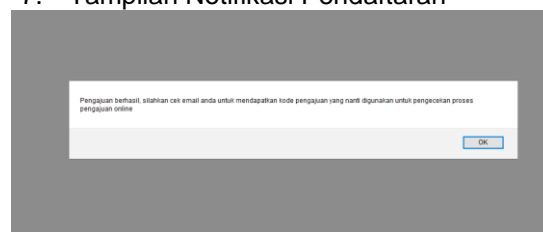
Gambar 3. 15. Antar Muka Persyaratan Pengajuan

6. Tampilan Form Pendaftaran Pengajuan
Selanjutnya mengisi form pengajuan yang ada pada halaman permohonan pengajuan.



Gambar 3. 16 Antar Muka Form Pengajuan

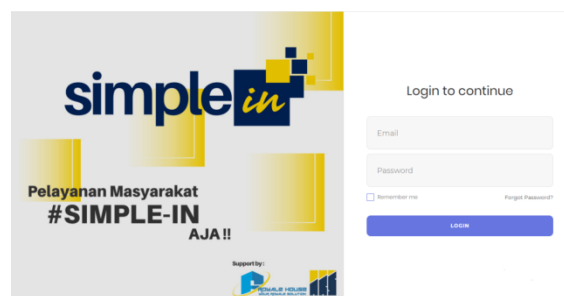
7. Tampilan Notifikasi Pendaftaran



Gambar 3. 17 Antar Muka Notifikasi

3.4.5 Implementasi Antar Muka User Administrasi

1. Tampilan Login User Administrasi
Pada tampilan berikut, user Administrasi diwajibkan untuk menginputkan Email serta password yang telah diberikan.

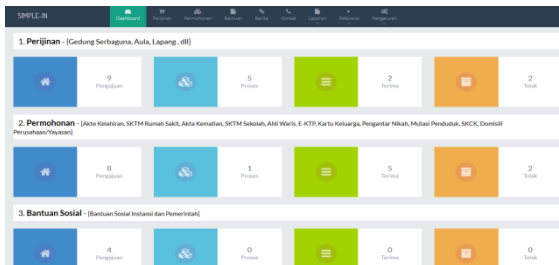


Gambar 3. 18 Antar Muka Login User Administrasi

2. Tampilan Utama Menu User Administrasi

Pada halaman utama ini terdapat jumlah data yang telah masuk, dari mulai jumlah pengajuan, jumlah data yang

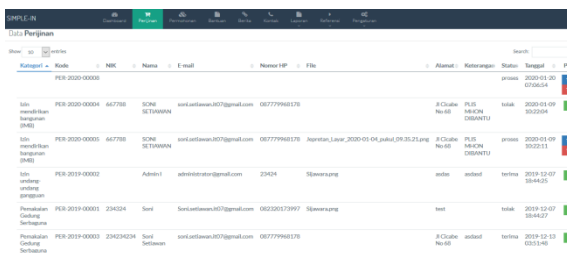
sedang di proses, jumlah data yang sudah di terima serta jumlah data yang di tolak. Biasanya surat yang ditolak oleh admin merupakan permintaan surat yang dokumen atau persyaratannya kurang lengkap atau perlu dilengkapi ulang.



Gambar 3. 19 Antar Muka Menu Utama User Administrasi

3. Tampilan Menu Perijinan User Administrasi

Pada menu ini terdapat data-data dari masyarakat yang telah mengajukan surat permohonan perijinan kepada pihak kelurahan setempat yang dapat langsung diverifikasi oleh pihak admin. Pada bagian ini admin akan mengecek terkait data-data yang telah di ajukan.



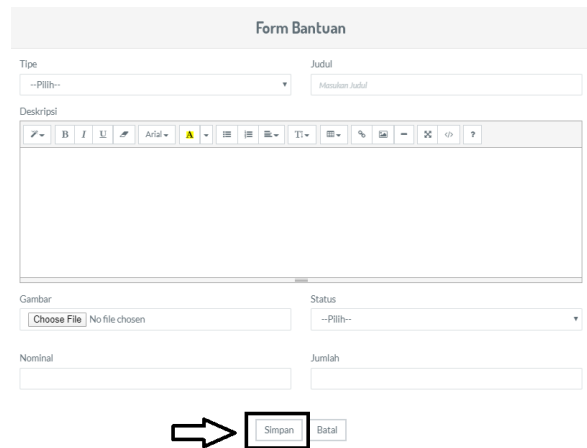
Gambar 3. 20 Antar Muka Menu Perijinan

4. Tampilan Menu Bantuan Sosial

Pada menu bantuan ini admin dapat menambahkan berita mengenai bantuan yang terbaru yang masih aktif serta mengubah dan menghapus data yang lama dan diganti dengan data terbaru.

a. Tampilan Menu Tambah Bantuan Sosial

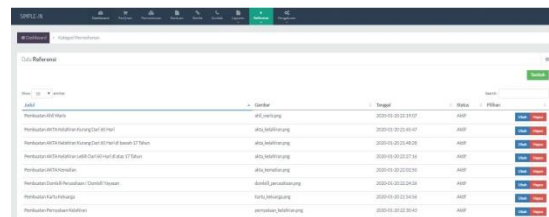
Pada halaman berikut merupakan form yang harus diisi dalam penambahan data bantuan sosial.



Gambar 3. 21 Antar Muka Form Tambah Data Bantuan Sosial

5. Tampilan Menu Referensi Kategori Permohonan

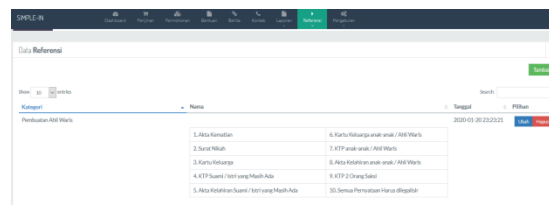
Pada halaman ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang di kategori kedalam permohonan, dan berikut tampilan pada halaman kategori permohonan



Gambar 3. 22 Antar Muka Menu Kategori Permohonan

6. Tampilan Menu Referensi Persyaratan Permohonan

Pada menu persyaratan permohonan ini digunakan oleh admin untuk menambahkan persyaratan pada kategori permohonan.



Gambar 3. 23 Antar Muka Menu Persyaratan Permohonan

a. Tampilan Form Tambah Data Persyaratan Permohonan

Pada halaman berikut merupakan form yang harus diisi dalam penambahan data persyaratan permohonan.

Gambar 3. 24 Antar Muka Form Tambah Data Kategori Permohonan

4. Kesimpulan

Berdasarkan dari penjelasan yang telah dikemukakan pada bab-bab diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem informasi yang ada di Kelurahan Sukabungah Kota Bandung masih menggunakan sistem manual sehingga pelayanan yang ada masih kurang maksimal, oleh karena itu dengan dibuatnya sistem baru ini akan dapat mendukung pembenahan pelayanan menjadi lebih baik. Dalam skripsi yang telah dibuat dengan judul “Sistem Informasi Administrasi Dan Pelayanan Kantor Kelurahan Sukabungah Kota Bandung” adapun kesimpulan dari sistem perancangan tersebut antara lain:

1. Pembuatan sistem informasi *website* berbasis elektronik ini dapat mempermudah pelayanan sistem administrasi kelurahan dalam proses permohonan serta perijinan menjadi lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan sistem yang sedang berjalan saat ini.
2. Dengan adanya sistem administrasi kantor kelurahan berbasis *web* ini dapat mempermudah pendataan atau pengarsipan data warga masyarakat yang telah mengajukan surat permohonan atau perizinan pada kantor kelurahan.
3. Dengan adanya sistem ini dapat menjadi *platform* bagi kelurahan dalam penyediaan informasi-informasi penting yang ditujukan untuk masyarakat, seperti halnya informasi persyaratan pembuatan surat perizinan, permohonan, informasi bantuan sosial serta informasi lain seputar warga setempat. Selain itu warga masyarakat juga menjadi lebih mudah dalam mengakses dan mendapat informasi mengenai kelurahan.

4. Dengan adanya sistem informasi pengolahan data yang tersimpan dalam *database* admin kelurahan menjadi lebih mudah dan sangat terbantu dalam menyusun laporan data.

4.1 Saran

Dari kesimpulan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada peneliti selanjutnya yang mungkin dapat membantu sistem kerja pada kelurahan menjadi lebih optimal. Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1. Agar mudah dalam pengajuannya secara keseluruhan maka disarankan agar sistem verifikasi pengajuan dilakukan pada struktur paling bawah yaitu pada bagian Rt dan Rw agar seluruh aktivitas dalam pengajuan menjadi lebih cepat diproses.
2. Agar memudahkan pihak kelurahan dalam melakukan konfirmasi pengajuan, disarankan menggunakan sistem yang berbasis desktop, agar konfirmasi yang dilakukan dapat digunakan dimana saja secara cepat.

Referensi

- Amalia, E., & Adietya. (2019). *Analisis dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture dengan Menggunakan United Nations Model*. 3(1).
- Hediyanto, U. Y. K. S. (2019). *Penelitian E-Government di Propinsi Jawa Barat: Kajian Pustaka Sistematis*. 19(2018), 95–104.
- Juliana, R. F., Renaldi, F., & Santikarama, I. (2019). *Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Desa Cikande Jawa Barat*. 38–44.
- Mubarok, A., Riana, D., Sanjaya, R., Prasetyo, R. T., Ramdhani, Y., Rismayadi, A. A., ... Herliana, A. (2018). *Sistem Informasi Pelayanan Online di Mapolresta Bandung*. 1(1), 1–6.
- Syafriyani, I. (2019). *Implementasi E-Government Dalam Menjawab Tantangan Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep*.
- Taqiya, N. A., Mukaromah, S., & Pratama, A. (2020). *Analisis Tingkat Kematian SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur*. XV, 22–33.

-
- Wibiksana, I. G., Lestary, D., & Azmi, A. U. (2019). *Implementasi Kebijakan Pelaksanaan E-Goverment Pada Desa Sayang Kabupaten Sumedang*. 7.
- Yudhanto, Y., Ardhi, O. D. W., & Purbayu, A. (2017). Perancangan Dan Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Desa (Simda). *Seminar Nasional Teknologi Informasi Dan Multimedia 2017*, 1–6.
- Yuhefizar, Sanjani, H., & Chadri, R. (2019). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Goverment) Dengan Pendekatan Bottom-UP Berbasis Web di Sumatera Barat. *SEMINAR NASIONAL MULTIDISIPLIN ILMU*, 2.